



Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

<http://ejournal.upg45ntt.ac.id/index.php/ciencias/index>

Partisipasi Komite Sekolah Pada Pelaksanaan Program Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru

Nani Purnawati^a, Rini Setyaningsih^b

^{ab} UIN Sultan Syarif Kasim Riau,

email: nanipurnawati1998@gmail.com, rinisetyaningsih28@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 03 April 2024

Direvisi: 25 Juni 2024

Disetujui: 22 Juli 2024

Keywords:

Partisipasi, Komite Sekolah, Program Sekolah.

Abstrak

Partisipasi Komite Sekolah pada Pelaksanaan Program Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi komite sekolah di SMA Negeri 15 Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterapkannya Manajemen Berbasis sekolah (MBS) dan pentingnya mengetahui keterlibatan komite sekolah pada pelaksanaan program mengingat tinggi rendahnya partisipasi komite akan menjadi cerminan kemajuan sekolah tersebut. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program-program sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi komite sekolah berdasarkan perannya adalah : sebagai badan pendukung, badan pertimbangan, badan pengontrol dan badan penghubung sangat dibutuhkan, hal ini untuk mempercepat pelaksanaan program kerja sekolah baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Kata kunci : Partisipasi, Komite Sekolah, Program Sekolah

Abstract

This research aimed at knowing how the participation of school committee at State Senior High School 15 Pekanbaru. This research was instigated by the implementation of School Based Management and the importance of knowing the involvement of the school committee in program implementation considering high or low the school committee participation that will berefection school progress. This research focused on the implementation school programs. Qualitative approach was used in this descriptive research. The techniques of collecting data were observation, interview, and documentation study. The research finding showed that the participation of school committee based on their roles were as supporters, advisors, controller and connectors that were needed, these to accelerate the implementation of school work program academically and non-academically.

Keyword : Participation, School Committee, School Program.

✉ Alamat korespondensi:

Kampus FKIP, Jl. Perintis Kemerdekaan III/40, Kota Kupang

E-mail: kip.j3p@gmail.com

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai pendidikan memang tidak akan ada habisnya karena pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan kunci kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia tujuan dari kegiatan pendidikan dijelaskan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia.

Dalam paradigma baru, proses penyelenggaraan pendidikan menggunakan pola Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang salah satu hal pokok penerapannya adalah otonomi pemberdayaan sekolah dan pemberdayaan seluruh sumber daya sekolah. Salah satu sumber daya sekolah yang berpotensi adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat sekitar sekolah dan orang tua peserta didik. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat saja, melainkan juga ada beberapa pihak yang bertanggungjawab seperti pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak sekolah, orang tua dan masyarakat (Marsofiyanti & Susan Febriantina, 2016).

Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Disebutkan ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di antaranya adalah : pada pasal 8 UUSPN disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, sedangkan pasal 9 menyebutkan bahwa masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya. Pasal 10 UUSPN menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat dan merupakan bagian dari masyarakat, dengan

demikian hubungan antara keduanya sangat erat dan saling bergantung dalam mencerdaskan masyarakat. Pihak sekolah membutuhkan bantuan dari masyarakat, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan non material yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan. Hal ini sangat penting karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut (Siti Roskina Mas, 2013).

Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang beberapa pihak seperti keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Agar partisipasi tersebut dapat lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan, maka perlu dikelola dan dikoordinasikan dalam suatu wadah yang kemudian disebut dengan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, dan Komite Sekolah disetiap satuan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program kerja di satuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

Dari perspektif sejarah persekolahan, SD/MI, SLTP/MTs, dan SMU/SMK/MA, masyarakat sekolah khususnya orangtua siswa, telah memerankan sebagian fungsinya dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. Sebelum tahun 1974, masyarakat dan orangtua siswa di lingkungan masing-masing sekolah telah membentuk Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG). Kemudian sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah semakin meningkat, maka POMG pada awal tahun 1974 dibubarkan dan dibentuk suatu badan yang dikenal dengan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), dan pada tahun 2002 dibentuklah Komite Sekolah.

Adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi

desentralisasi atau menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, dimana dalam hal ini telah membuka peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Peran dan tanggungjawab masyarakat sebagai sasaran pembangunan di bidang pendidikan dan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan dapat ditingkatkan dan terpenuhi dengan adanya suatu wadah untuk bekerjasama menyalurkan aspirasi dan menggali potensi masyarakat yaitu melalui komite sekolah.

Di dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah dibentuk dalam rangka memaksimalkan peran dan andil masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap keberhasilan program pendidikan.

Inti dari penerapan kebijakan tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat secara bertahap dan saling berhubungan sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.

Kemajuan dalam suatu instansi pendidikan harus didukung dengan tingginya tingkat partisipasi Komite Sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan dibentuknya komite di satuan pendidikan yang tertuang dalam permendikbud nomor 75 tahun 2016. Dengan adanya partisipasi komite sekolah pada sebagian pelaksanaan program kerja sekolah dimungkinkan suatu sekolah bisa memperoleh pelayanan yang bagus.

Komite Sekolah merupakan mitra sekolah yang dibentuk berdasarkan hubungan

masyarakat, orang tua, dan sekolah yang diadakan melalui rapat baik secara musyawarah maupun mufakat. Selain itu, tujuan dari pembentukan komite sekolah yaitu meningkatkan program sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antar warga sekolah yang dapat membantu bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Selain tujuan, komite sekolah juga mempunyai peran yaitu sebagai badan pemberi pertimbangan, badan pendukung, badan pengawas (controlling), dan badan penghubung. Berdasarkan hal tersebut, peran dan tujuan komite sekolah sangat diperlukan dalam pelaksanaan program sekolah.

Sekolah memerlukan komite sekolah alasannya karena peningkatan kualitas serta berkembangnya suatu sekolah tidak pernah terlepas dari dukungan yang optimal oleh Komite, Kemajuan sekolah tersebut akan terwujud apabila komite sekolah mendukung dan menguatkan program- program bermutu yang akan dilaksanakan oleh sekolah (Ali Mustadi, Enny Zubaidah & Sumardi, 2016).

Menurut Yunita Endra Megianti (2016) memaparkan bahwa dalam upaya mengaplikasikan transformasi konsep komite sekolah memerlukan konsep bertahap dari waktu ke waktu, mulai dari tingkat menyadarkan perlunya fungsi komite baik kepada masyarakat maupun kepada penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu peluang bentuk partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Menurut peneliti, melihat dari beberapa artikel yang terkait masalah penelitian tentang komite sekolah, dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa dengan adanya hubungan kerjasama antara sekolah dan komite sekolah yang berjalan baik bisa meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Dengan demikian, partisipasi komite sekolah dalam pelaksanaan program sekolah sangat penting karena dengan adanya partisipasi dalam bentuk pemberi dukungan, pertimbangan, pengawasan dan penghubung maka segala program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan oleh sekolah dengan lancar dan segala kekurangan dari program tersebut

dapat dicarikan solusi untuk meningkatkan program tersebut di masa yang akan datang.

Melalui penelitian ini dapat diketahui peran komite sekolah dan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi komite sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru.

KAJIAN PUSTAKA

A. Partisipasi

Definisi Partisipasi merupakan terjemahan dari istilah yang diambil dari bahasa Inggris Participation. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi yaitu turut berperan serta dalam suatu kegiatan.

Partisipasi menurut Isbandi dalam Suwari Akhmaddhian & Anthon Fathanudien (2015) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Made Pidarta yang dikutip oleh Siti Irene Dwiningrum (2011), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Partisipasi bisa juga diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Menurut Theodorson yang dikutip oleh Markus Wantik, Joorie M Ruru dan Rully Mambo (2020) partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari

kegiatan masyarakat diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Menurut Heller, dkk sebagaimana dikutip oleh Adrian Wilkinson, Paul J. Gollan, dan Mick Marchington (2010) dalam The Oxford Handbook of Participation in Organizations:

“Participation (partisipasi) yaitu Participation must be a group process, involving groups of employees and their boss; others stress delegation, the process by which the individual employee is given greater freedom to make decisions on his or her own”

“Secara sederhana, pengertian partisipasi yaitu suatu proses yang melibatkan beberapa orang untuk menekankan delegasi, dimana individu diberi kebebasan untuk mengambil keputusannya sendiri.”

Dari pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pengertian partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program kerja dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Basrowi yang dikutip oleh Siti Irene (2011), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: partisipasi fisik dan partisipasi non fisik. Partisipasi fisik yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud). Partisipasi non fisik yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak).

Bentuk partisipasi dapat berupa dukungan fisik yaitu dukungan dengan memberikan usaha-usaha berupa *financial* yang kemudian dibelanjakan dalam bentuk barang. Dukungan *financial* tersebut diperoleh melalui memberikan proposal kepada usaha industri agar komite sekolah

dapat mendapatkan sponsor untuk melaksanakan program-program tersebut. Sedangkan, bentuk dukungan non fisik yaitu keikutsertaan masyarakat dengan menyumbangkan beberapa saran dan tenaga untuk perbaikan dan pengembangan fasilitas sekolah. Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, dan pengambilan keputusan.

B. Komite Sekolah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 dijelaskan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Selanjutnya pada pasal 56 ayat 3 dijelaskan bahwa komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu layanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pada satuan pendidikan.

Di dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 1 ayat 2 dijelaskan juga bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Kepengurusan komite sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang dengan susunan ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Paling lama masa jabatan komite sekolah yaitu selama 3 tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis sebagai gambaran dari berbagai unsur yang bertanggungjawab

terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Keberadaan komite sekolah harus menjadi faktor terbentuknya sekolah yang efektif, hal ini akan terwujud jika kepala sekolah mampu menggandeng komite sekolah dalam merencanakan, melaksanakan serta mengembangkan nilai-nilai program sekolah. Komite sekolah sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi terhadap pengembangan program dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pembentukan komite harus sesuai dengan peran yang ada. Adapun peran yang dijalankan menurut Muhammad Rohman dan Sofan Amri (2012), yaitu sebagai berikut:

1. Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*Supporting Agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*Controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Penghubung/Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

C. Program sekolah

Istilah program sering dipahami sebagai sebuah rencana atau rancangan kegiatan.

Menurut Hogwood dan Gunn dikutip oleh Wahab dalam Nian Nurdiantini (2018) program merupakan suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan atau legitimasi, pengorganisasian, pengarahan atau penyediaan sumber-sumber yang diperlukan.

Menurut Bintoro Tjokroamidjoyo dalam Yanti Nurdianti dan Neneng Nurmalasari (2020) program adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Secara umum program sekolah diartikan sebagai kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan sekolah, berlangsung dalam proses berkesinambungan, terjadi dalam suatu organisasi sekolah. Program sekolah merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Menurut peneliti Program sekolah adalah sekumpulan rencana kerja sekolah yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan sekolah. Program sekolah juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang sudah terencana dengan sistematis untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata secara berkelanjutan dalam organisasi sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang mengangkat judul Partisipasi komite sekolah pada pelaksanaan program sekolah di SMA Negeri 15 Pekanbaru adalah penelitian lapangan (*field research*)

yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Menurut Zuchri Abdussamad (2021) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang yang disebut informan atau partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang akan diwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai partisipan adalah Kepala sekolah, ketua komite sekolah, dan anggota komite.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa deskripsi data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian peneliti di SMA Negeri 15 Pekanbaru yaitu partisipasi komite sekolah pada pelaksanaan program sekolah. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer peneliti peroleh langsung dari hasil wawancara dengan *key* informan dan informan pendukung, *key* informan disini adalah Bapak Jabarullah.K.R.S, Sos selaku sekretaris komite. Informan pendukung antara lain : yaitu Bapak Slamet, S. Pd kepala SMA Negeri 15 Pekanbaru, ibu Syarti Eka Masni selaku Wakil kepala urusan hubungan masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari data yang sudah ada dan berkaitan dengan objek penelitian seperti AD/ART Komite SMA Negeri 15 Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

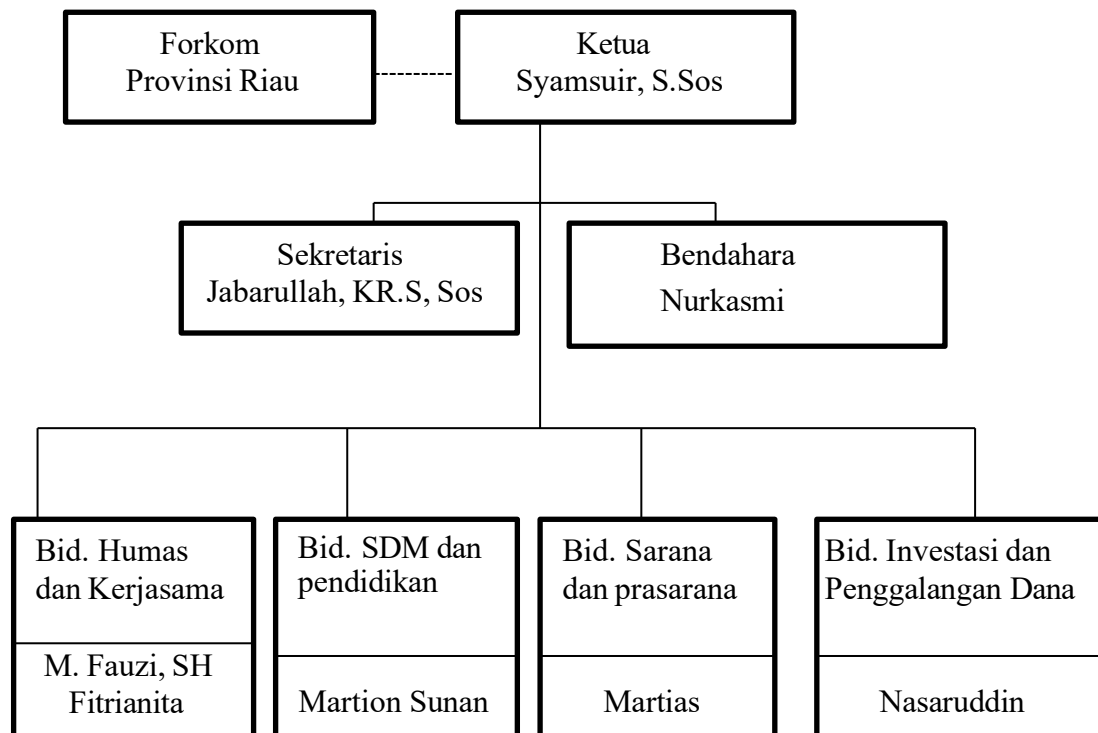
Hasil Penelitian

Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru sebagai lembaga penyelenggara pendidikan di kecamatan Tampan yang memiliki berbagai program sekolah baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler. Dalam pelaksanaan program-program tersebut

tentunya tidak lepas dari peran orang tua dan masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah, hal ini dikarenakan komite sekolah merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi orang tua dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan sekolah. Selama berada di lingkungan sekolah, komite sekolah selalu dilibatkan dalam berbagai program-program yang ada, hanya saja keterlibatan

tersebut memiliki batasan-batasan tertentu sesuai dengan peranannya.

Berikut ini struktur komite sekolah di SMA Negeri 15 Pekanbaru:



Gambar : Struktur Komite Sekolah SMA Negeri 15 Pekanbaru TA 2022/2023.

Pada saat penulis melakukan observasi di lokasi penelitian, dapat penulis paparkan bahwa partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan terutama pada pelaksanaan program-program sekolah di SMA Negeri 15 Pekanbaru belum bisa dikatakan optimal berdasarkan peranannya baik peran sebagai badan pendukung, badan pertimbangan, badan pengawasan maupun badan penghubung, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Rohman dan Sofan Amri dimana pembentukan komite harus sesuai dengan peran yang ada, yaitu peran sebagai badan

pendukung badan pertimbangan, badan pengawasan maupun badan penghubung.

Pembahasan

A. Partisipasi komite sekolah sekolah terkait perannya pada pelaksanaan program sekolah di SMA Negeri 15 Pekanbaru

1. Partisipasi komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*)

Temuan penelitian yang penulis dapat terkait peran komite sebagai

badan pendukung yaitu: keterlibatan komite sekolah dalam pelaksanaan program sekolah di SMA Negeri 15 Pekanbaru terlihat dari adanya dukungan berupa dana, tenaga, maupun pikiran/ide/gagasan. Dalam pemberian dukungan dalam bentuk *financial*. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Basrowi yang dikutip oleh Siti Irene, dimana partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: partisipasi fisik dan partisipasi non fisik, dimana partisipasi fisik meliputi pengadaan sarana dan prasarana disekolah seperti kursi, komputer, dan menambah bangunan seperti pembangunan pagar sekolah, parkir, sedangkan partisipasi non fisik berupa uang dengan menyumbangkan dana partisipasi terhadap sekolah. Menurut pendapat penulis dalam pelaksanaan program pendidikan, uang merupakan syarat penting, hal ini untuk menjaga kelangsungan kegiatan program kerja sekolah yang akan dijalankan atau kegiatan operasional sekolah. Di dalam temuan penelitian sudah pasti ada pembiayaan untuk masing-masing program sehingga dengan uang dapat menimbulkan partisipasi komite sekolah. Dukungan yang bersifat dana berupa pemberian sumbangan berupa sumbangan awal masuk tahun ajaran baru terhadap kegiatan program kerja sekolah sementara bantuan tenaga yaitu pengurus komite sekolah selalu ikut serta jika ada pembangunan, sedangkan dukungan berupa pikiran yaitu komite sekolah memberikan ide terkait program-program yang dijalankan sekolah. Faktor penghambat atau kendala-kendala partisipasi komite sekolah dalam pelaksanaan program sekolah yaitu kendala partisipasi komite sekolah

di bidang pendukung yaitu apabila dalam pelaksanaan program kerja sekolah kekurangan biaya sehingga program kerja sekolah harus ditunda sampai dananya mencukupi.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan sekretaris komite sekolah bahwa dalam pengadaan komite sekolah juga terdapat kendala yaitu berupa pengadaan yang belum mencapai 100 %, hal ini disebabkan oleh ekonomi kerena pendapatan orang tua siswa yang berbeda-beda.

2. Partisipasi komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*)

temuan penulis terkait peran komite sebagai badan pertimbangan ikut berpartisipasi dengan pihak sekolah melaksanakan hal-hal berikut :memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan kebijakan dan kegiatan sekolah, memberi pertimbangan terhadap pengelolaan sekolah, memberi pertimbangan anggaran yang dapat di manfaatkan sekolah, memberi pertimbangan sarana prasarana yang diadakan sekolah, juga memberi pertimbangan terhadap program sekolah. Terkait dengan pengelolaan sekolah yang ada di SMA Negeri 15 Pekanbaru yang selama ini telah berjalan, komite sekolah melimpahkan keseluruhan wewenang kepada kepala sekolah untuk menentukan sistem pengelolaan sesuai dengan kondisi anggaran dan sumber daya manusianya (SDM). Komite sekolah biasanya dalam setiap pertemuan rapat yang diadakan sekolah telah mencurahkan segenap ide-ide dan gagasan-

gagasan terhadap program-program pendidikan yang dilaksanakan sekolah.

Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan komite sekolah akan menjadi landasan berfikir bagi pihak sekolah dalam membuat kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan pendidikan.

3. Partisipasi komite sekolah sebagai badan pengawasan/pengontrol (*controlling agency*)

Temuan penelitian yang penulis dapatkan dari peran komite sekolah sebagai pengontrol bukan saja untuk siswa melainkan pengawasan pada program-program yang telah dibuat dan disepakati bersama, dan komite sekolah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap apa yang dikerjakan oleh sekolah. Komite sekolah melakukan evaluasi setiap 3-6 bulan dalam kegiatan sekolah baik dalam pendidikan maupun pembangunan. Mengadakan rapat komite sekolah dengan sekolah terkait kegiatan sekolah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Rohman dan Sofan Amri, yaitu peran komite sekolah sebagai badan pengawasan/pengontrol yaitu apabila program-program tersebut sudah dilaksanakan maka peran komite selanjutnya yaitu mengawasi kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga dapat mengevaluasi kegiatan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

4. Peran komite sebagai badan penghubung

Temuan penulis pada peran komite disini yaitu menyampaikan segala program komite kepada

masyarakat maupun dengan orang tua siswa sekaligus mensosialisasikan agar masyarakat lebih memahami tentang peran komite agar terciptanya kerjasama yang efektif dan efisien. Hubungan komite sekolah dengan sekolah terjalin antara lain karena komunikasi, hal ini karena komite sekolah memang seharusnya dapat menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah sebagai eksekutif dan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan. Dalam dunia pendidikan pasti membutuhkan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki tanggungjawab yang sama dengan sekolah. Hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan merupakan sarana yang sangat berperan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, dalam hal ini yaitu pemerintah, wali murid, masyarakat, dan siswa.

B. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi komite sekolah

Dari temuan data yang penulis temukan faktor pendukung partisipasi faktor pendukung dari partisipasi komite sekolah antara lain:

1. Pada aspek transparan, dapat dilihat bahwa pihak sekolah dengan komite maupun orang tua siswa adanya keterbukaan dalam melakukan program.
2. Pada aspek akuntabel, pihak sekolah dengan komite maupun orang tua siswa berusaha sebaik mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program

Faktor penghambat seperti minimnya pengetahuan mengenai tugas-tugas komite sekolah serta minimnya waktu

untuk koordinasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah.

Kemudian pada pelaksanaan dan fungsi komite sekolah tidak selalu dapat memenuhi harapan, contohnya pada saat sekolah mengadakan rapat bersama perangkat komite sekolah ada beberapa yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Hal-hal tersebut yang membuat partisipasi komite sekolah sebagian peranannya dikatakan kurang optimal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi komite sekolah di SMA Negeri 15 Pekanbaru terkait peranannya ada yang telah optimal dilakukan dan adapula yang belum optimal, seperti peran partisipasi komite sebagai badan pendukung hal ini belum bisa dikatakan optimal karena dalam pelaksanaan program sekolah yaitu kendala partisipasi komite sekolah di bidang pendukung yaitu apabila dalam pelaksanaan program kerja sekolah kekurangan biaya sehingga program kerja sekolah harus ditunda sampai dananya mencukupi. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan sekretaris komite sekolah bahwa dalam pengadaan komite sekolah juga terdapat kendala yaitu berupa pengadaan yang belum mencapai 100 %, hal ini disebabkan oleh ekonomi kerena pendapatan orang tua siswa yang berbeda-beda. Peran komite sebagai badan pertimbangan bisa dikatakan sudah optimal hal ini dikarenakan ikut berpartisipasi dengan pihak sekolah melaksanakan hal-hal berikut :memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan kebijakan dan kegiatan sekolah, memberi pertimbangan terhadap pengelolaan sekolah, memberi pertimbangan anggaran yang dapat di manfaatkan sekolah, memberi pertimbangan sarana prasarana yang diadakan sekolah, juga memberi pertimbangan terhadap program sekolah. Peran komite sebagai badan pengawasan/pengontrol sudah dikatakan optimal hal ini karena Komite sekolah melakukan evaluasi setiap 3-6 bulan dalam

kegiatan sekolah baik dalam pendidikan maupun pembangunan. Peran komite sebagai badan penghubung juga sudah optimal hal ini karena peran komite disini yaitu menyampaikan segala program komite kepada masyarakat maupun dengan orang tua siswa sekaligus mensosialisasikan agar masyarakat lebih memahami tentang peran komite agar terciptanya kerjasama yang efektif dan efisien. Faktor pendukung partisipasi Pada aspek transparan, dapat dilihat bahwa pihak sekolah dengan komite maupun orang tua siswa adanya keterbukaan dalam melakukan program sekolah. Pada aspek akuntabel, pihak sekolah dengan komite maupun orang tua siswa berusaha sebaik mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program. Sedangkan faktor penghambat seperti minimnya pengetahuan mengenai tugas-tugas komite sekolah serta minimnya waktu untuk koordinasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah.

Kemudian pada pelaksanaan dan fungsi komite sekolah tidak selalu dapat memenuhi harapan, contohnya pada saat sekolah mengadakan rapat bersama perangkat komite sekolah ada beberapa yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar:CV Syakir Media Press
- Akhmaddhian, S., & Fathanudien, A. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Dwiningrum, S. I. A. (2011) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Nurdiantini, N. (2018). Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap di SMPN Satu Atap Terpadu 1 Warung Jeruk

Kabupaten Purwakarta (*Doctoral Dissertation, Perpustakaan*)

Pembelajaran di Sekolah Dasar, Cakrawala Pendidikan, (3), 95578

Nurdiyanti, Y., Nurmalasari, N. (2020) Manajemen Program Keterampilan dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Warga Belajar. (*Kolokium: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*)

Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 1 ayat 2

Rohman, Muhammad dan Sofan Amri, (2012). *Manajemen Pendidikan (Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif)*. Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya

Marsofiyanti, M., & Febriantina, S. (2016). Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Sekolah di Kota Depok (Studi Kasus Pada Komite Sma Al-Qudwah Kota Depok). *Jurnal Ilmiah Econosains*, 14(2).

Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mas, S. R. (2013). Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal el hikmah*.

Wantik, M., Ruru, J., & Mambo, R, (2020) Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Silokarno Doga Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, *Jurnal Administrasi Publik*, 6(93).

Megiati, Y. E. (2016). Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep dan Implementasinya. *Jurnal SAP (susunan artikel pendidikan)* 1(2).

Wilkilson, Adrian. Dkk (2010). *The oxford handbook of participation in organization* (UK : Oxford University Press)

Mustadi, A., Zubaidah, E., & Sumardi, S. (2016). *Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu*